# PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAPORAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA TELUK BAKUNG KECAMATAN AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA

Oleh:
**SRITIANA**
NIM: E11110036

Program Studi Ilmu Sosiatri Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak, 2015

*E-mail: sritianakristianai@gmail.com*

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu *pertama* untuk mendiskripsikan partisipasi masyarakat dalam pelaporan peristiwa kependudukan. *Kedua*,untuk mengungkapkan rendahnya paritisipasi masyarakat dalam pelaporan peristiwa kependudukan. *Ketiga* rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan peristiwa kependudukan yaitu dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain faktor pendukung dan faktor penghambat . Penelitian ini termasuk penelitian Deskriptif dengan analisis Kualitatif. Hasil penelitian di lapangan menunjukan bahwa *pertama* partisipasi masyarakat dalam pelaporan peristiwa kependudukan tidak berjalan dengan baik terutama dalam pelaporan pindah dan datang. *Kedua* masyarakat kurang ber partisipasi terutama dalam tahap perencanaan,tahap pelaksanaan dan tahap pemanfaatan . *Ketiga* rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan peristiwa kependudukan dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran diri masyarakat dalam melaporkan peristiwa kependudukan terutama kelahiran,kematian dan migrasi . Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaporan peristiwa kependudukan,pemerintah setempat diharapkan dapat meningkatkan frekuensi sosialisasi tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan peristiwa kependudukan.

Kata-kata Kunci : Partisipasi Masyarakat ,Administrasi Kependudukan, Pelaporan Peristiwa Kependudukan.

# PUBLIC PARTICIPATION IN THE REPORTING POPULATION ADMINISTRATION TELUK BAKUNG IN THE VILLAGE AMBAWANG SUBDISTRICT KUBU RAYA REGENCY

By:
**SRITIANA**
NIM: E11110036

Program The Study Sosiatri Faculty of Social and Politics Science
University of Tanjungpura Pontianak, Year 2015

*Email: sritianakristianai@gmail.com*

## ABSTRACT

The purposes of this study are is the *first* to describe the community participation in reporting the events of residence. *Second* to reveal low community participation in reporting the events of residence. *Thirdly* low community participation in reporting the events of residence is influenced by several factors, among others, the factors supporting and inhibiting factors. This study are included descriptive research with qualitative analysis. Results of the study showed that the *first* field of community participation in reporting demographic events are not going well, especially in the reporting moved and come. Both the public are participate, especially in the planning phase, the implementation phase and utilization phase. *Thirdly* low community participation in reporting the events of population affected by the lack of self-awareness in the community reported the events of residence especially births, deaths and migration. To increase public participation in reporting the events of population, local governments are expected to increase the frequency of dissemination of the importance of community participation in reporting the events of residence.

Keywords: community participation, population administration, reporting demographic events.

## A. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang multi dimensi secara pengelolaannya melibatkan segenap aparat pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah bahkan sampai ditingkat desa. Komponen atau aparat dimaksud hendaknya memiliki kemampuan yang optimal dalam pelaksanaan tugasnya. Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut *"Acte"* atau *"akta"* dan dalam bahasa Inggris disebut *"Act"* atau *"deed"* menurut pendapat umum mempunyai dua arti yaitu:Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*). Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau untuk digunakan sebagai Perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang ditunjukkan kepada pembuktian tertentu. Pengertian Akta menurut (Pasal 165 Tahun 1941 Nomor 84) adalah : "Surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perhal pada akta itu". Akta sangatlah penting artinya karena dalam peristiwa penting seperti kelahiran, perkawinan, perceraian dan sebagainya akan membawa akibat hukum bagi kehidupan yang bersangkutan dan juga terhadap orang lain atau pihak ketiga,

Dengsan adanya sebuah akte akan membawa kejelasan dan kepastian sesuatu hal secara mudah. Akta adalah suatu bukti tentang peristiwa penting yang dialami seseorang yang telah dicatat atau didaftarkan serta dibukukan.

Ada 4 macam daftar yang dibuat oleh pegawai catatan sipil antara lain : daftar kelahiran, daftar perkawinan, daftar perceraian dan daftar kematian. Yang mana dari keempat jenis akte tersebut berfungsi sebagai :

1. Merupakan alat bukti paling kuat dalam menentukan kedudukan seseorang
2. Merupakan alat otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna di depan hakim
3. Memberikan kepastian hukum yang berkaitan tentang kejadian- kejadian mengenai kelahiran, kematian, perkawinan dan pengakuan perceraian
4. Dari segi peristiwanya akta-akta kelahiran dari catatan sipil dapat dipergunakan untuk tanda bukti yang



**SRITIANA,** NIM. E11110036
Program Studi Ilmu Sosiatri Fisip UNTAN

otentik dalam hal pengurusan paspor, WNI, KTP, keperluan sekolah, bekerja, menentukan status ahli waris dan sebagainya. Tujuan administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik & Pembangunan sektor lain. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Salah satu hal yang dibutuhkan adalah kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat dalam menunjang suksesnya pelaksanaan program pembangunan tersebut. Selain itu juga diperlukan kebijaksanaan pemerintah untuk mengarahkan serta membimbing masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan program pembangunan. Partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam upaya mencapai sasaran program pemerintah diseluruh wilayah Republik Indonesia.

## B. KERANGKA TEORI

Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. (*Pasal 1 Angka 11 UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*).

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Sosial di Pengantar Partisipasi berasal dari bahasa Inggris “participation”, yaitu pengikut sertaan atau pengambilan. Menurut Keith Davis, partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosi. Partisipasi adalah suatu gejala demokrasi dimana orang diikut sertakan dalam suatu perencanaan serta dalam pelaksanaan dan

juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya. Partisipasi itu bisa dalam pembangunan fisik, sosial, ekonomi, politik, pertahanan keamanan dan lain sebagainya.

1. *Participation Tools* Untuk bisa berpartispasi dalam pembangunan, maka harus dilakukan beberapa persiapan. Pertama, menetapkan bidang yang akan digeluti. Kedua, membentuk badan hukum yang akan dijadikan sarana partisipasi. Ketiga, menetapkan tujuan berpartisipasi misalnya dalam bidang sosial. Keempat, melaksanakan partispasi.Kelima melakukan evaluasi dan monitoring. Untuk bisa berpartisipasi dengan baik, Maka harus membentuk badan hukum. Menurut Cohen dan Uphoff (2001), partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembuatan keputusan tentang apa yang dilakukan, dalam pelaksanaan program dan pengambilan keputusan untuk berkontribusi sumberdaya atau bekerjasama dalam organisasi atau kegiatan khusus, berbagi manfaat dari program pembangunan dan evaluasi program pembangunan.Sedangkan menurut Ndraha (1990), diacu dalam Lugiarti (2004), partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dapat dipilah meliputi:
   a. partisipasi dalam / melalui kontak dengan pihak lain sebagai awal perubahan social.
   b. partisipasi dalam memperhatikan / menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya.
   c. partisipasi dalam perencanaan termasuk pengambilan keputusan
   d. partisipasi dalam pelaksanaan operasional
   e. partisipasi dalam menerima, memelihara, dan mengembangkan hasil pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai tingkat pelaksanaan pembangunan.

Survey partisipasi oleh *The International Association of Public Participation* telah mengidentifikasi nilai inti partisipasi sebagai berikut (Delli Priscolli, 1997), yang diacu dalam Daniels dan Walker (2005):

1. Masyarakat harus memiliki suara dalam keputusan tentang tindakan

yang mempengaruhi kehidupan mereka.

2. Partisipasi masyarakat meliputi jaminan bahwa kontribusi masyarakat akan mempengaruhi keputusan.
3. Proses partisipasi masyarakat mengkomunikasikan dan memenuhi kebutuhan proses semua partisipan.
4. Proses partisipasi masyarakat berupaya dan memfasilitasi keterlibatan mereka yang berpotensi untuk terpengaruh.
5. Proses partisipasi masyarakat melibatkan partisipan dalam mendefinisikan bagaimana mereka berpartisipasi.
6. Proses partisipasi masyarakat mengkomunikasikan kepada partisipan bagaimana input mereka digunakan atau tidak digunakan.
7. Proses partisipasi masyarakat memberi partisipan informasi yang mereka butuhkan dengan cara bermakna.

Koentjaraningrat (2002:79) dalam partisipasi khususnya partisipasi rakyat pedesaan ada dua tipe yaitu:

1. Partisipasi dalam aktivitas-aktivitas bersama dalam proyek-proyek pembangunan yang khusus.
2. Partisipasi sebagai individu diluar aktivitas-aktivitas bersama dalam pembangunan.

Korten (1988) menyatakan dalam pembahasannya tentang berbagai paradigma pembangunan mengungkapkan bahwa dalam paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat, partisipasi adalah proses pemberian peran kepada individu bukan hanya sebagai subyek melainkan sebagai aktor yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya. Sedangkan Migley (1986) melihat partisipasi sebagai upaya memperkuat kapasitas individu dan masyarakat untuk mendorong mereka dalam menyelesaikan permasalan yang mereka hadapi.

Sedangkan Menurut Ndraha (1990), (dalam Lugiarti 2004). partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dapat dipilah meliputi;

1. partisipasi dalam / melalui kontak dengan pihak lain sebagai awal perubahan sosial,
2. partisipasi dalam memperhatikan / menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya,

3. partisipasi dalam perencanaan termasuk pengambilan keputusan,
4. partisipasi dalam pelaksanaan operasional,
5. partisipasi dalam menerima, memelihara, dan mengembangkan hasil pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai tingkat pelaksanaan pembangunan.

Menurut Tjokroamidjojo (1996:207)ada tiga (3) dimensi untuk mewujudkan partisipasi masyarakat yaitu:

1. Partisipasi dalam tahap perencanaan
2. Partisipasi dalam tahap peleksanaan
3. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan.

Masyarakat bukan hanya diperlukan namun sudah menjadi tujuan utama dari pembangunan itu sendiri. Dimana dengan adanya pembangunan diharapkan adanya kesempatan, kesediaan dan kemampuan bekerja anggota masyarakat didalamnya. Berbagai info sistem pemerintah desa dan Administrasi Kependudukan Republik Indonesia**.** Apa itu Sistem Pemerintah Desa? Suatu kebulatan atau keseluruhan proses atau kegiatan berupa antara lain proses pembentukan atau penggabungan desa, pemilihan kepala desa, peraturan desa, kewenangan, keuangan desa dan lain-lain yang terdiri dari berbagai komponen badan publik seperti Perangkat Desa, Badan Pemusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Unsur yang merupakan karakteristik dari sebuah Desa :

a. Penduduk Desa
b. Daerah atau Wilayah Desa
c. Pemimpin Desa
d. Urusan atau Rumah Tangga Desa Dasar Hukum Sistem Pemerintah Desa: d. UU 32 Tahun 2004 dimana diakui adanya otonomi desa dalam keanekaragaman serta demokratisasi pemerintahan desa. Pengaturan lebih lanjut tentang Desa tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Continue flyer text here. Continue flyer text here. Continue flyer text here. Continue flyer text here. Continue flyer text here. Created by: Kelompok III Diklat Penggerak Swadaya masyarakat Angkatan 10 Pusdiklat Kemenakertrans Delete text and place photo here.

## C. METODE PENELITIAN

Metode atau jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud memberikan gambaran suatu gejala sosial



**SRITIANA,** NIM. E11110036
Program Studi Ilmu Sosiatri Fisip UNTAN

tertentu, sebelumnya sudah ada informasi mengenai gejala sosial tersebut,namun belum memadai ( Mulia dan Tohardi, 2005:58). Sejalan dengan pendapat tersebut Moleong (2006: 18) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif adalah untuk memberikan gambaran secara rinci mengenai suatu keadaan, gejala atau objek tertentu pada saat penelitian dilakukan berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya.jenis penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang menyarankan agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan fakta ysang sudah ada berdasarkan fenomena hidup para penuturnya. Ini berarti bahwa penelitian yang dilakukan berguna untuk memberikan gambaran yang obyektif. Dengan demikian penelitian akan memperoleh dan mengumpulkan data dengan lengkap. Data dalam penelitian kualitatif bukanlah berdasarkan tabel angka-angka hasil pengukuran atau penelitian secara langsung yang mana dianalisis secara statistic, melainkan mengacu pada makna serta pemahaman terhadap interaksi antar konsep data yang dianalisis. 1. Tempat penelitian dilakukan di Desa Teluk Bakung Kecamatan Ambawang Kabupaten Kubu Raya . Alasan saya memilih ini karena terdapat masalah yang akan diteliti yaitu rendahnya tingkat partisipasi masayakat dalam Pelaporan Administrasi Kependudukan di Desa Teluk Bakung. 2. Teknik Pengumpulan Data Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, teknik wawancara , pengamatan langsung,kuesioner dan metode analisis data. 3. Teknik Wawancara, aitu percakapan anatara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk ,mendapatkan informasi dimana si pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang diwawancarai. 4. Metode pengamatan langsung (*participant observation*) Metode pengamatan langsung yaitu suatu metode yang digunakan,dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung kepada subyek yang diteliti. Dengan menggunakan metode seperti ini, maka akan memudahkan peneliti dalam mengkaji dan dalam mengambil data dari masyarakat Adapun instrumen data dalam penelitian yaitu: 5. Pedoman Obsevasi Menurut Namawi (2012:106),yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Untuk memaksimalkan hasil observasi biasa

peneliti akan mengunakan alat bantu yang sesuai dengan kondisi lapangan diantaranya alat bantu observasi tersebut misalnya: menyiapkan alat berupa buku catatan ,dan daftar panduan(chec list) kamera kemudian melakukan pengamatan langsung kelapangan di desa Teluk Bakung kecamatan Ambawang Kabupaten Kubu Raya. 6. Teknik analisi data menurut Sugiyono (2007:89),adalah proses mencari dan menyusun secara sisitematis data yang diperoleh dari hasil wawancara catatan lapangan dan dokumentasi ,dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit,melakukan sintesa,menyusun kedalam pola ,memilh mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain . 7. Teknik Keabsahan Data Keabsahan data merupaksan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas).dan keadaan (reabilitas) menurut persi ‘positivisme’ dan di sesuaikan dengan tuntutan pengetahuan,criteria,dan paradigmanya sendiri. keabsahan data juga dapat berarti setiap keadaan yang memenuhi:mendemonstasikan nilai yang benar,menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan dan memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya( moleong,2011:320-321). Dalam penelitian dilakukan pengecekan keabsahan data melalui:

a. Kredibilitas(kepercayaan),merupakan ukuran kebenaran data yang dikumpulkan yang mengambarkan kecocokan konsep peneliti dengan hasil penelitian. Kredibilitas (derajat kepercayaan) data diperiksa melalui kelengkapan data yang diperoleh dari berbagai sumber.
b. Konfirmabilitas(kepastian),adalah menujukan bahwa data yang diperoleh dapat dilacak kebenaranya dan sumberinformanya jelas. Artinya keberadaan data dapat ditelusuri secara pasti dan dijangkau oleh orang lain.
c. Transperabilitas (keteralihan),keberhasilan penelitian dapat digunakan dalam konteks dan situasi tertentu, sebagai bahan rujukan, contoh dan dipelajari oleh penelitian lebih lanjut.

## D. GAMBARAN UMUM PELAPORAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA TELUK BAKUNG

Berdasarkan data dari Kantor Desa , Administrasi Kependudukan merupakan

rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolahan Informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik & Pembangunan sektor lain. Namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Masayarakat di Desa Teluk Bakung karena masyarakat disana kurang disiplin dan tidak bekerjasama dengan pemerintah setempat terutama dalam Pelaporan Administrasi Kependudukan dan mereka kurang memperhatikan hal tersebut karena mereka anggap itu hal biasa . Salah satu pelaporan administrasi kependudukan yang biasanya masyarakat jarang melapor yaitu pembuatan KTP,pembuatan KK,pindah rumah,jarang melaporkan kelahiran dan kematian mengapa mereka melakukan hal tersebut dikarenakan masyarakat tidak begitu memperdulikan bagi masyarakat yang kurang mampu seperti membuat KTP dan KK mereka angap itu tidak begitu penting,begitu juga dengan pindah rumah ,sedangkan akta kelahiran dan kematian dikarenakan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan dan alasan nya bisa jadi jarak kantor desa dengan pemukiman mereka yang lumayan jauh sehingga mereka malas melapor.

1) Pelaksanaan Adminisitrasi kependudukan di desa Teluk Bakung, setelah berlakunya UU No. 23 tahun 2006 Berdasarkan hasil penelitian dilapangan Pelaksanaan admnistrasi kependudukan (KTP dan KK) di desa Teluk Bakung Kecamatan Anbawang Kabupaten Kubu Raya berpedoman pada UU No. 23 tahun 2006 yang diatur kemudian dengan PP No. 37 tahun 2007 dan PERDA Kabupaten Kubu Raya No. 7 tahun 2008. Dalam PERDA No. 7 tahun 2008 Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pecatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Peraturan-peraturan tersebut adalah dasar hukum penyelenggaraan administrasi kependudukan untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Dimana salah satunya adalah mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat aman, tentram, kondusif. Sehingga diperlukan penataan dan pelayanan publik yang prima, Efektif dan efisien dalam

mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Namun, pada real dilapangan dalam hal penataan administrasi kependudukan di Desa Teluk Bakung belum tercapai secara optimal dan maksimal. Belum optimalnya penataan dan pelaksanaan administrasi kependudukan terlihat dengan adanya masyarakat yang belum memiliki kartu administrasi kependudukan berupa KTP dan KK walaupun telah dilakukan beberapa upaya oleh pihak penyelenggara administrasi kependudukan. Adapun upaya-upaya yang pernah dan sudah dilakukan sebagai berikut:

1. Mengadakan penyuluhan atau sosialisasi untuk menggugah kesadarn masyarakat begitu pentingnya melengkapi diri dengan identitas diri berupa Akta Catatan Sipil. 2. Membuat Program pelayanan jemput bola berupa akta masal ke desa-desa. 3. Bekerjasama dengan pihak lain misalnya dengan dinas pendidikan, dunia usaha maupun pihak imigrasi yang tujuannya sebelum masyarakat berusandengan pihak-pihak tertentu harus melengkapi identitas diri, serta 4. Melakukan penertibsan setiap tahunnya bekerjasama dengan unsur polsek dan koramil. Kegiatan penertiban yang dilakukan bukan menindak melainkan untuk melakukan pembinaan dan sekaligus sosialisasi akan pentingnya administrasi kependudukan.

2.) Sikap Tertib Administrasi Kependudukan khususnya di desa Teluk Bakung

Upaya itu dilakukan dengan tetap mengacu pada ketentuan UU No. 23 Tahun 2006 dan Perda Kabupaten Kubu Raya No. 7 tahun 2008. Upaya tersebut merupakan realisasi dari program yang dicanangkan oleh Dinas Kependuduka dan Catatan Sipil mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pelayanan prima pada publik. Adapun beberapa program kerja meliputi :a. Pembangunan dan pengoprasian SIAK secara terpadu b. Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, *updating*, dan pemeliharaan)c. Pengolahan dalam penyusunan laporan administrasi kependudukan. d. Penyediaan informasi yang dapat di akses masyarakat. e. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan f. Penyusunan kebijakan kependudukan. g.Sosialisasi kebijakan kependudukan. h.Monitoring, evaluasi, dan pelaporan (sumber:*Dokumen*

*Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/DPA-SKPD*).

3) Kegiatan , program dan organisasi yang dilakukan Pemerintah dalam menangani Pelaporan Administrasi

Ada 4 macam daftar yang dibuat oleh pegawai catatan sipil antara lain : daftar kelahiran, daftar perkawinan, daftar perceraian dan daftar kematian. Yang mana dari keempat jenis akta tersebut berfungsi sebagai :

1. Merupakan alat bukti paling kuat dalam menentukan kedudukan seseorang
2. Merupakan alat otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna di depan hakim
3. Memberikan kepastian hukum yang berkaitan tentang kejadian- kejadian mengenai kelahiran, kematian, perkawinan dan pengakuan perceraian
4. Dari segi peristiwanya akta-akta kelahiran dari catatan sipil dapat dipergunakan untuk tanda bukti yang otentik dalam hal pengurusan paspor, WNI, KTP, keperluan sekolah, bekerja, menentukan status ahli waris dan sebagainya.

Akta Kelahiran adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh atau mendapat kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang, maka perlu adanya bukti-bukti yang otentik yang mana sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukum seseorang itu. Dari isi akta kelahiran tersebut, maka akta kelahiran anak sah membuktikan tentang hal-hal sebagai berikut: Data lahir, Kewarganegaraan (WNI atau WNA), Tempat Kelahiran, Hari, tanggal, bulan dan tahun kelahiran, Nama lengkap anak,Jenis kelamin anak ,Nama ayah,Nama ibu, Hubungan antara ayah dan ibu, Tanggal, bulan dan tahun terbit akta dan Tanda tangan pejabat yang berwenang. Pada penelitian ini akan dibatasi pada akta kelahiran saja, dimana akta kelahiran merupakan akta catatan sipil hasil pencatatan peristiwa kelahiran seseorang.

4) Kemampuan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintah Di Desa Teluk Bakung.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa tugas dan fungsi pemerintah dalam demikian luas dan kompleks (admiristrasi dalam arti luas) yaitu meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Hal ini berarti tugas perangkat desa juga demikian adanya, karena perangkat desa adalah merupakan salah satu

unsur pemerintahan dalam, oleh karena itu untuk kepentingan kajian ini dibatasi pada pelaksanaan tugas perangkat desa dalam arti sempit (ketatausahaan) yang meliputi: surat-menyurat dan penyimpanannya (kearsipan).

Adapun pelaksanaan tugas dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pencatatan atau Registrasi

Register adalah suatu aktivitas pemerintahan dengan maksud untuk mendokumentasikan berbagai peristiwa dan atau kegiatan yang telah terjadi melalui pencatatan-pencatatan di dalam format yang telah ditetapkan. Daftar register dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat dalam hingga sekarang ini yang digunakan di Desa Teluk Bakung adalah berdasarkan pada Kepmendagri Nomor 414.3/316/PMD/2003, tentang Register Dalam. Dalam Keputusan tersebut, ditetapkan adanya tiga jenis buku yang terdiri dari: Buku Administrasi Umum, meliputi Buku Kekayaan dan inventaris dalam, buku tanah, buku keputusan dalam dan buku agenda, Buku Administrasi Penduduk, meliputi Buku Induk Penduduk dan Buku Rekapitulasi Penduduk Akhir Bulan ,Buku Administrasi Keuangan meliputi Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu.

5) Kedasaran Penduduk Dalam Perekaman Data Kependudukan Di Desa Teluk Bakung.

*Warga Pendatang Yang Malas Lapor. Salah seorang Administrator Data Base (ADB) di desa Teluk Bakung Kabupaten Kubu Raya mengatakan bahwa setelah KTP diintegrasikan dengan berbagai layanan publik, terdapat intensitas yang cukup tinggi dari masyarakat untuk melaporkan perubahan kependudukan. Dulu, pisah KK dan lain-lain jarang dilaporkan masyarakat kepada petugas perekaman data. Sekarang dengan adanya berbagai bentuk bantuan instan dari pemerintah, intensitas itu meningkat hingga 200 kali.* Sebelum ada program instan, pelaporan kependudukan terjadi hanya sekitar 10 kali dalam sebulan, sekarang bisa mencapai 200 laporan setiap bulannya. ”jumlah pemohon KK dan KTP dapat diindikasikan meningkat sejak setahun ini dikarenakan adanya kebijakan dari pemerintah seperti askeskin, konversi gas, PKH dan lain-lain. Beberapa tahun yang lalu, sebelum ada kebijakan-kebijakan yang pro rakyat dari pemerintah, intensitas masyarakat yang melaporkan kejadian kependudukan sangat kecil sekali, seiongat saya paling

hanya ada 10 orang per bulan. Tetapi sekarang bisa meningkat hingga 200 kejadian per bulan. Jadi, menurut saya, ada hubungan antara intensitas pelaporan dan kemiskinan dengan bantuan instan pemerintah itu. Adanya program-program dari pemerintah terkait keterkaitan KK dan KTP dengan berbagai paket bantuan itu, masyarakat kemudian membuat laporan kejadian kependudukan seperti pisah KK, pindah alamat dan lain-lain dan semua itu berdampak pada signifikansi dan intensitas pelaporan.

Banyak factor yang menjadi penyebab tidak lapor itu, diantaranya adalah kesibukan kerja dan lain-lain, pelaporan biasanya hanya dilakukan kepada RT dan Pak RT yang juga sibuk tidak meneruskan pelaporan itu ke pihak kecamatan. Terkait malas lapor ini banyak sebab, diantaranya adalah tidak terakomodirnya dirinya sebagai penerima paket bantuan, kesibukan bekerja, hanya domisili sementara dan lain-lain. Namun, penduduk jenis ini tidak mengganggu administrasi kependudukan karena data kependudukannya telah valid pada alamat yang sebelum. Klasifikasi pindah dapat dibedakan menjadi lima kriteria, yakni:

Klasifikasi 1: dalam satu Kelurarahan

Klasifikasi 2: antar Kelurahan dalam satu Kecamatan

Klasifikasi 3: antar kecamatan dalam satu Kota Kabupaten/Kota

Klasifikasi 4: antar Kabupaten / Kota dalam satu Propinsi

Klasifikasi 5: antar Propinsi dalam wilayah Indonesia.

Jenis pengurusan pindah yang agak rumi,t adalah jenis ke-4 dan ke-5 karena melibatkan dinas catatan sipil antar kabupaten dan kota, sementara dokumen kepindahan yang dibawa tidak lengkap sehingga tidak jarang petugas menjadi sasaran marah masyarakat. “Sudah tahu dirinya salah, tapi mereka tidak mengakui kesalahan itu dan kemudian melimpahkan kemarahan itu kepada petugas pencatat”, Meminta partisipasi Lurah/Kades berikut seluruh jajaran di tingkat satuan pemukiman: BPD, Kadus dan RT untuk ikut terlibat dalam menyukseskan perekaman data kependudukan.

6) Proses pembentukan Organisasi Pemerintah dalam Pelaporan Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Ambawang Desa Teluk Bakung.

Menurut hasil Penelitian diLapangan bahwa Kelembagaan struktur pembentukan organisasi Di Kecamatan

Ambawang Sebagai berikut: Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Pasal 1 menegaskan bahwa Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah kabupaten/kota . Penegasan tersebut mengandung dua pengertian. ***Pertama***, Kecamatan sebagai wilayah kerja Camat. ***Kedua***, Kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Kecamatan sebagai wilayah kerja secara administratif terbagi atas Desa-desa yang bersifat otonom dan mempunyai batas wilayah tertentu serta mempunyai penduduk. Sedangkan Kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas struktur kelembagaan formal, wadah menempatkan pegawai dan sekaligus sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang dipimpin oleh Camat. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang mendapat pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Dalam kedudukannya sebagai perangkat daerah Kabupaten maka efekstivitas kinerja Kecamatan perlu lebih ditingkatkan agar keberadaan Kecamatan dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang dilimpahkan Bupati berdampak nyata (*tangible impact)* bagi kemajuan Daerah dalam kerangka otonomi daerah. *Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan BT 50 Tahun (Seketaris Camat) mengatakan bahwa : dari dulu sampai saat ini program atau organisasi yang direncanakan pembangunan kecamatan Ambawang khususnya di Desa Teluk Bakung tidak Rutin dalam melaksanakan tugas pokok Desa terutama dalam Pelaporan Administrasi Kependudukan ,Adapun yang mereka lakukan yaitu 5 bulan sekali dalam mencatat atau melaporkan peristiwa kependudukan di kecamatan itu pun kalau ada,tetapi bagi masyarakat yang mau berpartisipasi atau bekerjasama yaitu ada juga sebagian masyarakat Desa Teluk Bakung melaporkan nya langsung ke kecamatan terutama untuk membuat KTP,akta kelahiran ,akta kematian ,akta perkawinan,minta ijin dalam migrasi dan lain sebagainya yg menyangkut Pelaporan Administrasi Kependudukan dan ada beberapa orang masyarakat Teluk Bakung maengatakan bahwa lebih leluasa mereka langusng berurusan dengan kantor camat terutama melakukan Pelaporan Administrasi Kependudukan.*

## E. PENUTUP

1. Sosialisasi dalam masyarakat dan pemerintah dalam melakukan Pelaporaan Administrasi Kependudukan kurang efektif dan tidak disiplin dalam menangani hal tersebut khususnya dalam pelaporan administrasi kependudukan.
2. Partisipasi dalam masyarakat tidak berjalan dengan baik dalam melakukan Pelaporan administrasi kependudukan. Seperti pindah dan datang (Migrasi),Pembuatan akta kelahiran, pembuatan angka kematian dan lain sebagainya yang menyangkut Pelaporan Administrasi Kependudukan . partisipasi dalam menerima , memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan ,yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai tingkat pelaksanaan pembangunan Partisipasi dalam tahap perencanaan dan pembangunan Desa juga sampai saaat ini belum terlakasana.
3. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan ,ada beberapa factor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat Dalam Pelapaoran Administrasi Kependudukan yaitu kesadaran diri,hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Sedangkan faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pelaporan administrasi kependudukan adalah kurangnya kesadaran individu / kelompok masyarakat dan pemerintah.

## F. REFERENSI

**Buku-buku:**

Adioetmo, Sri Moertiningsih dan Moertiningsih dan Omar Bulan Samosir .2010.Dasar-dasar Demografi.Jakarta : fakultas Ekonomi Universitas Indonesia – Salemba Empat .

Ali,faried M.,2004 ,*Filsafat Administrasi* ,PT Raja Grapindo Persada ,Jakarta

Adisasmita ,Raharjo.2006. membangun desa partisipatif. yogjakarta: Graha Ilmu.

Ananta ,Aris .1985.*Transisi Demografi, Transisi Pendidikan dan Transisi Kesehatan di Indonesia* .Penyunting Utama ,

Aris Ananta .Jakarta : Kantor Mentri Negara Kependudukan/BKKBN.

Azwar Rasjid .1981.*pelaksanaan Sensus Penduduk* 1980 di Indonesia Makalah disampaikan pada Pertemuan Peneliti Analisis Sensus Penduduk 1980 .2-5 November di Yogyakarta.

Arikunto , Suharsimi . 1993 . *prosedur penelitian -suatu pendekatan praktek* Jakarta : PT . Aneka Cipta .

Budi Utomo. 1985,Mortalitas **:** Pengertian dan Contoh Kasus di Indonesia ,Jakarta :Fakultas Kesehatan Masyarakat,UI.

Badan Pusat Statistik ,2001.*Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk* Tahun 2000 Seri L.2.2.Jakarta : BPS /Bland ,Chester and Dwight E.Lee.1976.*The Word Population .Bulltein Explosion An Historical Perspektive*.Massachusetts:Clack University Press.

Bogdan C.Robert dan Sari Knopp Biklen. 2007.*Qualitative Research For Education An Introduction To Theories and Method.* Boston :Syracuse University,Pearson.

Dada,Johosua.1989.*Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup* .Jakarta Rajawali Press.

Isbandi,Rukminto Adi.2007. Perencanaan Partisipasi Berbasis Aset Komunitas. Dari pemikiran menuju penerapan. Depok: fisip UI press.

Kasto dan Henry Sembiring .1995.*Profil Kependudukan Indonesia* Selama PJP I Awal PJP II.Yogyakarta : PPK –UGM.

Kinloch,C.Graham.2009.*Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiologi* .Bandung:Pustaka Setia.

Moleong J.Lexy.2012.*Metodologi Penelitian Kualitatif* .Edisi Revisi.Cetakan ke Dua Puluh Delapan .Bandung:Remaja Rosdakarya.

Siagin,Sondang,p,2000,*Administrasi pembangunan konsep,Dimensi ,dan strategi nya*,Bumi Aksara,Jakarta.1992,Kerangka Dasar Ilmu Administrasi ,Rineka Cipta,Jakarta.

Sikula,f,Andrew ,1981,*personel Administrasi and Human Resources Mana-gement john wiley and Sons Inc,New York.*

Soedjadi ,F .X ,1989 ,*Organization And Metode Methods : penunjang berhasilnya proses manajemen* ,Haji Masagung Jakarta.

Thoa ,Miftah .1992,*Dimensi –dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara* ,Jakarta ,PT.Raja Grafindo Persada.

**Publikasi dan Internet:**

Jim Ife .2006. *Community Development*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. Hal 294,295296,297,

Finna Rizqinna. 2010. *Partisipasi Masyarakat*. www.lontar.ui.id. Hal 14

Miriam Budiarjo. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal 381,382

Isbandi Rukminto Adi. Revisi 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal 227,228,229,230,231

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang *Pengelolaan Lingkungan*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang *Administrasi Kependudukan*.

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124
Homepage: http:/jurmafis.untan.ac.id

# LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

| | |
|---|---|
| Nama Lengkap | : Sritiana |
| NIM / Periode lulus | : E11110036/III |
| Tanggal Lulus | : 15 April 2015 |
| Fakultas/ Jurusan | : ISIP / Ilmu Sosiatri |
| E-mail addres/ HP | : sritianakristianai@gmail.com / 089647847853 |

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Sociodev*) pada Program Studi Ilmu Sosiatri Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**) :

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAPORAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA TELUK BAKUNG KECAMATAN AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

☐ Secara *fulltex*
☑ *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui
Pengelola Jurnal Sociodev

Antonia Sasap Abao, S.Sos, M.Si
NIP.198105102005012017

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 6 Juli 2015

Sritiana
NIM. E11110036

Catatan :
*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
*(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)*

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)